



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 642 TAHUN 2017

TENTANG

**PROGRAM PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, Gubernur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya yaitu tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perumusan rancangan awal RKPD mencakup perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - d. bahwa dalam rangka perumusan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

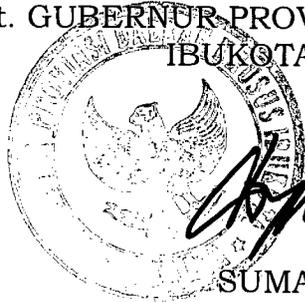
KEDUA : Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian dalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

KETIGA : Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 642 TAHUN 2017
Tanggal 22 Maret 2017

PROGRAM PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

NO	MAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PANGGUNG JAWAB
1	Menghadirkan Kembali Negara untuk <u>Melindungi</u> <u>Segenap Bangsa</u> <u>dan Memberikan</u> <u>Rasa Aman</u> pada Seluruh Warga Negara	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri	3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	SATPOL PP
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2	Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial	1	Persentase Berkas Perkar Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21	Persentase	SATPOL PP
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3	Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran	1	Tingkat Kerawanan Kebakaran	Indeks	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	Persentase Penanggulangan Kebakaran yang Berhasil	Persentase	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	4	Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2	Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	Persentase	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5	Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	Persentase Petugas Pemadam Kebakaran yang kompeten	Persentase	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	6	Program Pengelolaan Risiko Bencana	1	Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan	Persentase	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	7	Program Penanggulangan Bencana	1	Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana	Rate	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	8	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor	SATPOL PP	
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	9	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	SATPOL PP	
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	Indeks Kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	12	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	5	Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	13	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Keterteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	Indeks	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	Persentase Cakupan Kepernikahan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah								
					5	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan								

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	KOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Membangun <u>Tata Kelola Pemerintahan</u> yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik	5	Pemertapan kualitas organisasi pemerintah	3	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat	Persentase	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1	Jumlah Konflik Sosial	Konflik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	9	Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat	1	Indeks demokrasi	Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	Kesatuan Bangsa dan Politik	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PANGGUNG JAWAB
		Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan	3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	1	Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa	2	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan kebijakan dengan peraturan	peraturan	BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
			3		3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	2	Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Biro Administrasi Sekretariat Daerah	1	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan kebijakan dengan peraturan	kebijakan	BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
			3		3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
			3		3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	4	Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas	1	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas	peraturan	BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
			3		3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	25	Program Koordinasi Kebijakan Perkonomian	1	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	peraturan	BIRO PEREKONOMIAN
			3		3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	25	Program Koordinasi Kebijakan Perkonomian	2	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	kebijakan	BIRO PEREKONOMIAN

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENGANGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	26	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO PEREKONOMIAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	27	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Perekonomian	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO PEREKONOMIAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	21	Program Koordinasi Kejibakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual	1	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	kasus	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	21	Program Koordinasi Kejibakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual	2	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	kasus	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	22	Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual	1	Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah	angka	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	23	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	24	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	12	Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Jumlah ketidaksiapan antara kebijakan dengan peraturan	kasus	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	12	Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Jumlah ketidaksiapan antara peraturan dengan pelaksanaan	kasus	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	14	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kesejahteraan Sosial	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	42	Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD	Indeks	SEKRETARIAT DPRD
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	43	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		SEKRETARIAT DPRD

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	KOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	44	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		SEKRETARIAT DPRD
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	8	Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	1	Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil	Persentase	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	9	Program Keprotokolian dan Administrasi Pimpinan Daerah	1	Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolian dan Administrasi Pimpinan Daerah	Indeks	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	4	Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1	Persentase Regulasi yang Harmonis	Persentase	BIRO HUKUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	5	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	1	Kesadaran Hukum Masyarakat	Persentase	BIRO HUKUM

NO	NAWA CITTA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	5	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	2	Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan	Persentase	BIRO HUKUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	BIRO HUKUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Hukum	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan	BIRO HUKUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	33	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumah-tanggaan Daerah	1	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumah-tanggaan Kompleks Balikota dan Rumah Dinas Pimpinan	Indeks	BIRO UMUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	33	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumah-tanggaan Daerah	1	Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Kerumah-tanggaan Daerah	Persentase	BIRO UMUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	34	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks kepuasan pelayanan kantor	BIRO UMUM
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	35	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Umum	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	BIRO UMUM

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
		Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	1	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	1	Capaian Kinerja ASN	Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	2	Program Peningkatan Kapasitas KORPRI	1	Kepuasan Layanan KORPRI	Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	5	Program Pengembangan Kompetensi SDM	1	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	15	Program Penataan Kelmabatan, Ketertaksanaan dan SDM Aparatur	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	Indeks	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

37

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DIKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	15	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	16	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	17	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	28	Program Koordinasi Kebijaksanaan Tata Pemerintahan Daerah	1	Persentase Penyelesaian Masalah Pemerintahan	Persentase	BIRO TATA PEMERINTAHAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	29	Program Peningkatan Kejasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan	1	Jumlah Kerjasama yang Dilaksanakan dan Berhasil	Kerjasama	BIRO TATA PEMERINTAHAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	30	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1	Peningkat LPPD	Peningkat	BIRO TATA PEMERINTAHAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	31	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO TATA PEMERINTAHAN

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
3	Membangun Indonesia dari Dasar Dimulainya <u>Pinggiran dengan</u> <u>Memperkuat</u> <u>Daerah-daerah</u> dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	Peletakan Dasar- Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris	5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	1	Program Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	2	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	6	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	NAMA CITRA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	10	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	11	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	12	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	14	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	15	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	16	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA CITRA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	18	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi	Persentase	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	19	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	20	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	22	Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi	Persentase	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	23	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
					4	Kewilayahan	1	Kewilayahan	24	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	1	Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	Persentase	DINAS SOSIAL
					3	Pemantapan ketahanan sosial budaya								
						Penanggulangan Kemiskinan								

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	1	Program Rehabilitasi Sosial	2	Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan	Persentase	DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	2	Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial	1	Persentase (%) prasarana dan sarana rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan	Persentase	DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	3	Program Pemberdayaan Sosial	1	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	4	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri	Orang	DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	5	Program Perlindungan Sosial	1	Persentase penurunan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase	DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS SOSIAL
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	6	Sosial	7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS SOSIAL
4	Memperkuat Kebudayaan Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bernartabat dan Terpercaya	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Temuan dan Penyelesaian Hasil Pengawasan APIP	Persentase	INSPEKTORAT
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal	Persentase	INSPEKTORAT

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENGANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	40	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektoral/Inspektoral Pembantu	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		INSPEKTORAT
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	41	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektoral/Inspektoral Pembantu	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		INSPEKTORAT
		Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	1	Program Penyiadatan, Pembudayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	1	Jumlah pemuda yang berhasil dibina	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	1	Jumlah masyarakat aktif berolahraga	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	2	Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh	juara	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	2	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	19	kepemudaan dan olah raga	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
		Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah	2	Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	10	Pertanahan	1	Program Penyiapan Aksisi Tanah	1	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan	Persentase	DINAS CIPRA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
		Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal	3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Jumlah Kekerasan Anak	kasus	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	2	Jumlah Kekerasan Perempuan	kasus	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah	orang	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	8	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RP-PPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	14	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1	Program Pengendalian Penduduk	1	Total Fertility Rate (TFR)		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	14	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	14	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	lembaga	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	1	Persentase Angka Partisipasi Murmi SD/MI	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	2	Persentase Angka Partisipasi Murmi SMP/MTs	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	3	Persentase Angka Partisipasi Murmi SMA/SMK/MA	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	tahun	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	5	Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK	Persentase	DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PEMANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	6	Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1	Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	2	Rata-rata nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	3	Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	4	Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	5	Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	6	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	7	Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	8	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	9	Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	4	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase guru yang kompeten	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi	Persentase	DINAS PENDIDIKAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PENDIDIKAN

39

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/URPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/URPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	1	Pendidikan	8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PENDIDIKAN
			3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	1	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1	Jumlah balita gizi buruk	orang	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	1	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2	Persentase pemenuhan SPM kesehatan	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	1	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	3	Jumlah kasus penyakit potensial wabah	kasus	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	1	Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	2	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	3	Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	3	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1	Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	3	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2	Persentase penyalur alat kesehatan yang dipakai memenuhi standar	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	3	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	1	Persentase SDM kesehatan yang kompeten	Persentase	DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	5	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1	Jumlah Peserta Penetima Bantuan Iuran (PBI)	orang	DINAS KESEHATAN

808

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	2	Kesehatan	7	Program Pengelolaan Kenderaaan Operasional Urusan Kesehatan	1	Indeks kepuasan pelayanan kenderaaan operasional		DINAS KESEHATAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Program Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan	orang	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Program Pemberdayaan Masyarakat	2	Jumlah RPTRA Aktif		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	3	Program Pengelolaan Kenderaaan Operasional Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Indeks kepuasan pelayanan kenderaaan operasional		DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	1	Pemantapan kapasitas dan prasarana dan sarana Kota Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Program Pengendalian Banjir	1	Persentase penanganann genangan yang kurang dari 2 jam	Persentase	DINAS SUMBER DAYA AIR
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	1	Persentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah	persentase	DINAS SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	1	Persentase cakupan pelayanan air bersih	persentase	DINAS SUMBER DAYA AIR
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	2	persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku	persentase	DINAS SUMBER DAYA AIR
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS SUMBER DAYA AIR
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	10	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS SUMBER DAYA AIR
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	4	Program Pembangunan/Peningkata n Jalan dan Jembatan	1	penambahan road ratio	persentase	DINAS BINA MARGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan	persentase	DINAS BINA MARGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1	Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas	persentase	DINAS BINA MARGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	11	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS BINA MARGA
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	12	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS BINA MARGA

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN FOKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	7	Program Penataan Ruang	1	persentase pelaksanaan tata ruang yang ditangani	persentase	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	7	Program Penataan Ruang	2	Rasio Kesesuaian Rencana Tata Ruang	persentase	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	8	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Penda	1	Persentase pembangunan Gedung Penda yang memenuhi standar	persentase	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	13	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	3	pekerjaan umum dan penataan ruang	14	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	18	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	1	Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terdapat Rencana Tata Ruang	persentase	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	18	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	2	Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Lain Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	persentase	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA CITTA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	20	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Membangun Transportasi Umum Masalah Perkotaan		1	Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	1	Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari	orang	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	2	Program Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan angkutan	1	persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam)	persentase	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	2	Program Pengendalian dan Penerbitan Lalu Lintas dan angkutan	2	Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan	persentase	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	3	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	1	Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun	kejadian	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	3	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	2	Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun	kejadian	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	3	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	3	Jumlah kecelakaan angkutan berbasis rel per tahun	kejadian	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	4	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kelembahanan	1	persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan	persentase	DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	4	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Kelembahanan	2	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	unit	DINAS PERHUBUNGAN

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN FOKUS RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	15	Perhubungan	6	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PERHUBUNGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1	Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	1	persentase unit perumahan rakyat yang terbangun	persentase	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1	Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	2	Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana	persentase	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1	Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	3	persentase unit perumahan yang terpelihara	persentase	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	2	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	jumlah kawasan/fasilitas Permukiman yang diata	kawasan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	2	Program Penataan Kawasan Permukiman	2	persentase kawasan/fasilitas Permukiman yang terpelihara	persentase	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	3	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	1	Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	4	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	5	Program Pengelolaan Kerdaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1	indeks kepuasan pelayanan kerdaraan operasional		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	> Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1	persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		> Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur			3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2	persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD	dokumen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	3	persentase keselarasan RKPd terhadap KUA PPAS	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	4	persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	5	persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	6	persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
		>Penguatan Investasi	2	Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	18	Penanaman Modal	1	Program Peningkatan Penanaman Modal	1	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	rupiah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		>Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan			1	Urusan Pemerintahan Wajib	18	Penanaman Modal	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1		1	Urusan Pemerintahan Wajib	18	Penanaman Modal	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	1	indeks kepuasan pelayanan kantor	persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1		1	Urusan Pemerintahan Wajib	18	Penanaman Modal	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	persentase	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2		2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Pariwisata	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	1	persentase industri pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	persentase	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			2		2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Pariwisata	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	2	persentase SDM industri pariwisata bersertifikat	persentase	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			2		2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Pariwisata	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	3	Jumlah usaha pariwisata hiburan	unit	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			2		2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Pariwisata	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			2		2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Pariwisata	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	Jumlah Wisatawan Nusantara	orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Parwisata	2	Program Pengembangan Destinasi Parwisata	3	Jumlah objek wisata baru		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Parwisata	3	Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan parwisata	1	persentase kelengkapan sarana prasarana	persentase	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Parwisata	4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Parwisata	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	Parwisata	5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Parwisata	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	1	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	1	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	persentase	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	1	Program pembinaan dan Pengembangan Industri	2	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	persentase	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	2	Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	1	Persentase produk industri dengan standar SNI	persentase	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	2	Program Peningkatan dan Pengendalian Industri	2	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	persentase	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	Perindustrian	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	1	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	2	Service Level Agreement	persentase	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	1	Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	2	Jumlah Cakupan Layanan e-gov	Jumlah Cakupan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DABRAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	2	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	1	Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak	Persentase	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	2	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	2	Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	Persentase	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	16	Komunikasi dan Informatika	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	21	Persandian	1	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persentase	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	4	Penelitian dan pengembangan	1	Program Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	persentase	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			2	Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	17	koperasi, usaha kecil, dan menengah	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	1	Jumlah Volume Usaha Koperasi	rupiah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	17	koperasi, usaha kecil, dan menengah	2	Program Pembinaan dan Pengembangan UKM	1	pertumbuhan Jumlah usaha Mikro, Kecil, & Menengah	unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	17	koperasi, usaha kecil, dan menengah	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JEMIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTGO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional	2	Pemertapan stabilitas perekonomian Jakarta	2	Urusan Pemertahan Pilihan	6	Perdagangan	1	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	2	persentase keluar/temuan konsumen yang diindikasikan	persentase	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					2	Urusan Pemertahan Pilihan	6	Perdagangan	1	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	3	persentase cakupan alat UTPP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Penengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	persentase	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					2	Urusan Pemertahan Pilihan	6	Perdagangan	1	Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	4	jumlah ekspor yang dilakukan UMK DKI Jakarta	rupiah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					2	Urusan Pemertahan Pilihan	6	Perdagangan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
					2	Urusan Pemertahan Pilihan	6	Perdagangan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
	Peningkatan Daya Sainng Tenaga Kerja		2	Pemertapan stabilitas perekonomian Jakarta	1	Urusan Pemertahan Wajib	7	Tenaga Kerja	1	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1	jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANS MIGRASI

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005-2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSAN	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	1	Program Pembinaan dan Pemertanian Tenaga Kerja	2	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	persentase	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	2	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	1	Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian bersama (PB)	kasus	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	3	Program Peningkatan keputuhan terhadap bidang Ketenagakerjaan	1	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan	perusahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	3	Program Peningkatan keputuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	2	Jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3	perusahaan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	4	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	7	Tenaga Kerja	5	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah	1	Urusan Pemerintahan Wajib	20	Statistik	1	Program Pengembangan Data Statistik Sektor	1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik	Peningkatan Kedaulatan Pangan Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016	2	Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta	1	Urusan Pemerintahan Wajib	9	Pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Persentase ketersediaan pangan	persentase	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	9	Pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	2	tingkat keberhasilan pengendalian harga	persentase	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	KOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	9	Pangan	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	persentase	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	9	Pangan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	9	Pangan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	Pertanian	1	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	1	Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan	liter kg ton pohon	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	Pertanian	1	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	2	Jumlah kasus penyakit menular strategis	kasus	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	Pertanian	1	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	3	jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan	pelanggar	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	Pertanian	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	Pertanian	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	5	energi dan sumber daya mineral	1	Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan	1	Persentase bangunan/gedung/sarana/pras arana milik penda yang memiliki SLO ketenagalistrikan	persentase	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

38

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR. URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PERANGGUNG JAWAB
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	11	Lingkungan Hidup	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	11	Lingkungan Hidup	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	persentase	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	11	Lingkungan Hidup	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	11	Lingkungan Hidup	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	1	Program Pengelolaan Pertamanan	1	Penambahan rasio RTH Taman	persentase	DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	1	Program Pengelolaan Pertamanan	2	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	persentase	DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	2	Program Pengelolaan Pemakaman	1	Penambahan rasio RTH Makam	persentase	DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	2	Program Pengelolaan Pemakaman	2	indeks kepuasan masyarakat		DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	3	Program Pengelolaan Hutan	1	Penambahan rasio RTH Hutan	persentase	DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	3	Program Pengelolaan Hutan	2	Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	persentase	DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	4	Program Konservasi Satwa	1	Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi		DINAS KEHUTANAN

NO	NAMA CITTA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	4	Kehutanan	6	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KEHUTANAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	kelaunan dan perikanan	1	Program Pengelolaan Kelaunan dan Perikanan	1	Jumlah produksi perikanan	ton	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	kelaunan dan perikanan	1	Program Pengelolaan Kelaunan dan Perikanan	2	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya kelaunan dan perikanan	ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	kelaunan dan perikanan	1	Program Pengelolaan Kelaunan dan Perikanan	3	luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi	kasus	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	kelaunan dan perikanan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelaunan dan perikanan	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					2	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	kelaunan dan perikanan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelaunan dan perikanan	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	5	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	1	jumlah penerimaan pajak Daerah	triliun rupiah	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	5	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	2	jumlah piutang pajak daerah	triliun rupiah	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	6	Program Pengelolaan Retribusi Daerah	1	jumlah penerimaan Retribusi Daerah	miliar	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
					5	Pemantapan kualitas organisasi pemerintah								
					5	Penguatan Sektor Keuangan Penguatan Kapasitas Fiskal Negara								

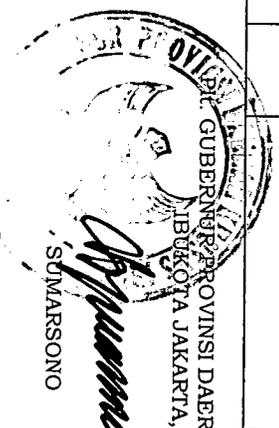
NO	NAMA CITRA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN URUSA	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	9	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Opini Laporan Keuangan Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	9	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	11	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	12	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	1	Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat	persentase	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	12	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	2	Persentase penyelesaian aset fasos fasum dan pihak lain	persentase	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	12	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	3	Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset	persentase	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	12	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	4	Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah	SKPD	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH

NO	NAMA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	KOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	13	Program Pemanfaatan Aset Daerah	1	Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan	rupiah	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	13	Program Pemanfaatan Aset Daerah	2	Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan	rupiah	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	14	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah	1	indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	2	Keuangan	15	Program Pengelolaan kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah	1	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	persentase	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	2	Jumlah pengadaan lewat kontrak payung	item	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	KOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	KOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Pungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Pungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Pungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	36	Program pembinaan dan Pengembangan BUMD	1	persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	persentase	BPBUMD
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Pungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	36	Program pembinaan dan Pengembangan BUMD	2	total laba bersih BUMD	triliun rupiah	BPBUMD
					3	Penunjang Urusan Pemerintahan	6	Pungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	37	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pembinaan BUMD	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		BPBUMD

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JEMIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/UKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	3	Pemertanian ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	23	Perpustakaan	1	Program Pelayanan dan Peningkatan Perpustakaan	1	Indeks minat baca	angka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	23	Perpustakaan	2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	23	Perpustakaan	3	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	NAWA CITA PRESIDEN RI DALAM RPJMN 2015-2019	SUB PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015- 2019	NO	SASARAN POKOK RPJPD DKI JAKARTA 2005- 2025	NOMOR JENIS URUSAN	JENIS URUSAN	NMR URUSA N	URUSAN DAERAH	NOMOR PROGRA M	PROGRAM PRIORITAS SKPD/URKPD	NOMOR OUTCO ME	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SKPD/UKPD PENANGGUNG JAWAB
9	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia		3	Pemantapan ketahanan sosial budaya	1	Urusan Pemerintahan Wajib	22	Kebudayaan	1	Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya	1	jumlah pelaku seni budaya yang diikuti	orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	22	Kebudayaan	1	Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya	2	jumlah pelaku seni budaya yang tampil	orang	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	22	Kebudayaan	2	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya	1	persentase cagar budaya yang berhasil divitalisasi	persentase	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	22	Kebudayaan	3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan	1	Indeks kepuasan pelayanan kantor		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	22	Kebudayaan	4	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan	1	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
					1	Urusan Pemerintahan Wajib	24	Kearsipan	1	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	1	Indeks kepuasan layanan kearsipan	angka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PLOK GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
SUMARSONO

SUMARSONO